



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT**

Jalan Angkasa Mulyono, Amban – Manokwari  
Telepon : (0986) 2217088; Faksimile : (0986) 2217087  
e-mail : papua.barat@bpkp.go.id

---

**NOTA DINAS**

**Nomor: OT.04/ND-108/PW27.1/2023**

Dari : Sub Koordinator Keuangan  
Kepada Yth. : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Sub Koordinator Keuangan  
Tahun 2022

---

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor HK.01/SE-11/SU/ 01/2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022, bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja Sub Koordinator Keuangan Tahun 2022 Nomor OT.108/LPP-01/PW27.6/2022 tanggal 29 Januari 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

29 Januari 2023

Sub Koordinator

Keuangan,

Samsul Hadi



# LAPORAN KINERJA SUB BAGIAN KEUANGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022





"Sendiri kita bisa melakukan lebih sedikit, bersama-sama kita bisa melakukan banyak hal ."Helen Keller

# DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
BAB 1 PENDAHULUAN	5
A. Tugas dan Fungsi Organisasi	5
B. Struktur Organisasi	6
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	7
A. Target Kinerja Tahun 2020 – 2024	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	8
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Tahun 2022	9
B. Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2022	16
C. Capaian Kinerja Lainnya	17
BAB 4 PENUTUP	18
A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022	18
B. Rencana Tindak Tahun 2023	18

# KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan peran Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022, Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah menetapkan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat telah melakukan cascading dan menetapkan Perjanjian Kinerja untuk seluruh Koordinator Pengawasan dan Kepala Bagian Umum.

Laporan Kinerja Sub Bagian Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 merupakan media akuntabilitas atas kinerja pencapaian sasaran kegiatan tahun 2022 yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan Tahun 2022.



Penyajian Laporan Kinerja ini telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor HK.01/SE-11/SU/ 01/2022 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022.

Semoga laporan kinerja Tahun 2022 Sub Bagian Keuangan ini bisa memberikan manfaat bagi Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk melakukan evaluasi kinerja

dan menetapkan langkah strategis untuk peningkatan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di tahun mendatang.

Sub Koordinator Keuangan



Samsul Hadi

# BAB I

## PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Sub Bagian Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi di Sub Bagian Keuangan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja Sub Bagian Keuangan merupakan Revisi Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan Anggaran yang ditetapkan dalam DIPA.

### A. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Sub Bagian Keuangan mempunyai tupoksi memimpin, mengoordinasikan, mengelola kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dan Pelaksanaan proses verifikasi, perbendaharaan, pengelolaan belanja pegawai penyusunan laporan keuangan semester I dan tahunan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.

Tugas Sub Bagian Keuangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat.
2. Penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta melakukan revisi anggaran.
3. Pengelolaan Keuangan melalui Aplikasi SAKTI Kemenkeu dengan mengimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
4. Pembuatan Daftar Gaji, Tunjangan Kinerja, Uang Makan, Lembur.
5. Pengadministrasian dan penerbitan surat perintah pembayaran (SPBY) Surat Perintah. Perjalanan Dinas (SPD) melalui Aplikasi Bisma.
6. Membuat Laporan Capaian Qut Put Smart DJA
7. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) Ke KPPN.
8. Rekonsiliasi Laporan Keuangan ke KPPN.
9. Membuat Laporan Keuangan Triwulanan, Semesteran dan Tahunan.

## B. STRUKTUR ORGANISASI

Sub Bagian Keuangan dipimpin Sub Koordinator Keuangan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Bagian Umum.

Saat ini Subkor Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat dijabat oleh Samsul Hadi

Jumlah pegawai Sub Bagian Keuangan per 31 Desember 2022 sebanyak 4 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Paidi	Bendahara
2	Hendrik Leonard	Operator Pengelola SAI
3	Mochammad Ridlo Fahmi Ilhami	Pembuat Daftar Gaji (PPBJ)
4	Fadillah Syafii	Pranata komputer

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh BPKP yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 diformulasikan dalam visi BPKP, yaitu Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan Trusted Advisor Pemerintah untuk Meningkatkan Good Governance Sektor Publik dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden 'Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong'.

Untuk mewujudkan visi tersebut, BPKP melaksanakan misi:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional.
2. Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas.

### **A. TARGET KINERJA TAHUN 2020 – 2024**

Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat merupakan penjabaran dari program strategis sesuai visi dan misi BPKP yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP untuk mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur. Visi dan misi serta tujuan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi BPKP yang tertuang dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2020 – 2024. Program untuk menunjang kegiatan tersebut terdiri dari program pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan program dukungan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum.

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang ditargetkan tahun 2020 – 2024 terdiri dari 6 sasaran kegiatan dengan 45 indikator kinerja yang terdiri dari 32 indikator kinerja kegiatan pengawasan (delivery) dan 13 indikator kinerja kegiatan dukungan pengawasan (enabler). Rincian dapat dilihat pada Lampiran.

Dari 32 indikator kinerja kegiatan pada Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2000 – 2024 yang berkaitan dengan Indikator Kinerja Kegiatan pada Sub Bagian Keuangan terdiri dari 1 (satu) IKK yaitu :



No	Sasaran/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja						
	Nilai IKPA Unit Kerja	Nilai Skala 100	90	90	95	95	95

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Untuk menilai kegiatan pada tahun 2022, telah disusun dalam Perjanjian Kinerja Subkor Keuangan sebagai dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Kepala Bagian Umum Perwakilan BPKP dengan Subkor Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Perjanjian Kinerja tersebut menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota Sub Bagian Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran kegiatan dengan menetapkan target indikator kinerja kegiatan.

Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat memuat 1 (satu) sasaran kegiatan dengan 1 indikator kinerja kegiatan pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022, Sub Bagian Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah mengumpulkan data kinerja yang merupakan capaian realisasi indikator kinerja atas target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, informasi yang mendukung/menghambat capaian kinerja, capaian realisasi dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keuangan, upaya peningkatan kinerja ke depan.

Data kinerja yang diperoleh diharapkan menghasilkan Laporan Kinerja (LKj) Sub Bagian Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berguna untuk pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip manfaat dan biaya, efisiensi, serta efektivitas.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Nilai IKPA Unit Kerja	%	95	97,29	102,41%

### A. Capaian Kinerja Tahun 2022

#### 1. Sasaran Kegiatan 1 - Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja.

Uraian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja sebagai berikut:

##### a. Indikator Kinerja Kegiatan - Nilai IKPA Unit Kerja

Indikator kinerja nilai IKPA diperoleh dari nilai implementasi IKPA melalui Sistem Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan (OM SPAN)

Pada tahun 2022, nilai IKPA Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat terealisasi sebesar 97,29 atau mencapai 102,41% dari target sebesar 95.

Nilai ini merupakan hasil penilaian melalui Sistem Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan (OM SPAN) tahun 2022 sebagai berikut

:

## Realisasi Sasaran Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Skor Skala	Realisasi
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100	100,00
	Deviasi Halaman III Dipa	100	87,58
	Penyerapan Anggaran	100	92,99
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Belanja Kontraktual	100	100,00
	Penyelesaian Tagihan	100	100,00
	Pengelolaan UP dan TUP	100	99,29
Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	Dispensasi SPM	100	100,00
	Capaian Qutput	100	100,00
	<b>Nilai Total</b>		<b>97,29</b>

Untuk meningkatkan kinerja di tahun 2023, Sub Bagian Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat akan melakukan:

- 1) Revisi DIPA secara efektif.
- 2) Penyampaian LPJ Bendahara Ke KPPN yang tepat waktu paling lambat tanggal 10 setiap bulan.
- 3) Upload data capaian qutput tepat waktu paling lambat tanggal 5 setiap bulan.
- 4) Pengajuan SPM Gaji Induk dan Penyampaian hard copy spm yang tepat waktu.
- 5) Pemutakhiran rencana penarikan dana pada halaman III DIPA melalui revisi DIPA setiap Triwulan.
- 6) Meningkatkan akurasi pencairan dana sesuai dengan perencanaan (halaman III DIPA).
- 7) Mengantisipasi dan segera menyelesaikan pagu minus.

### B. Capaian Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Sub Bagian Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022 sebesar Rp263.191.000,00 atau 0,11% dari total anggaran Perwakilan sebesar Rp22.217.760.000,00.

Realisasi anggaran Sub Bagian Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat tahun 2022 sebesar Rp263.191.000,00 atau terserap 100,00% dari pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp263.191.000,00.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Sub Bagian Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta tujuan yang dimandatkan oleh BPKP.

Laporan kinerja (LKj) ini merupakan periode pelaporan ketiga dalam merefleksikan pelaksanaan Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat 2020- 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Sub Bagian Keuangan Tahun 2022 yang telah ditetapkan, merupakan cascading dari Perkin Kepala Perwakilan yaitu sebanyak 1 Indikator Kinerja (IK) pada 1 sasaran kegiatan.

### A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022, 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi target Sub Bagian Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat telah mencapai kinerja  $\geq 100\%$ , dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 102,41%.

### B. Rencana Tindak Tahun 2023

Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat melingkupi 2 Provinsi yaitu Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Perubahan-perubahan tersebut menjadi tantangan lebih untuk tetap menjaga dan meningkatkan kinerja, dalam pengelolaan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk menunjang kinerja Sub Bagian Keuangan tahun 2023 antara lain:

1. Meningkatkan kualitas layanan Sub Bagian Keuangan
2. Melakukan monitoring penyerapan anggaran setiap bulan
3. Meningkatkan ketelitian dalam memproses SPM nomor rekening penerima/tujuan untuk menghindari retur SP2D
4. Menggunakan UP dan TUP secara efektif dan mempercepat revolving UP dengan pengajuan SPM GUP minimal 1 bulan satu kali
5. Meningkatkan kedisiplinan penyampaian data rekonsiliasi pada Aplikasi Sakti
6. Memastikan penyerapan anggaran Triwulan sudah sesuai target (15%,40%,60%,90%) dengan cara menyegerakan pencairan dan pelaksanaan kegiatan terutama belanja modal yg memerlukan proses PBJ